

Kerja Sama Bilateral Indonesia Australia dalam Mencegah Terjadinya Terorisme melalui *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*

Dzikra Zhafira Putri¹
Prilla Marsingga²

Abstract

In an effort to realize the welfare of its people, the state may not be able to meet its own needs, because in a country it is impossible for all the necessary needs to be contained in one country. Therefore, there is a need for bilateral cooperation or cooperation between the two countries. Likewise in addressing security challenges in the Asia Pacific. Not simply that, terrorism as a transnational crime will be very difficult if it is carried out by only one country so that regional cooperation is needed to build regional defense and security. Therefore, the Indonesian and Australian governments have jointly established a training and education institution, namely, the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). This institution was established to investigate cases of terrorism and transnational crime in the Asia Pacific region. This study discusses the bilateral cooperation between Indonesia and Australia in the field of defense and security through JCLEC in preventing the occurrence of terrorism after the Bali bombings. This study also discusses the strategies used by JCLEC in preventing terrorism. In order to gather facts and information from books, scholarly articles, theses, dissertations, encyclopedias, the internet, and other sources, this study uses the literature study approach. The results of this study show the strategies and steps taken by JCLEC in combating terrorism in Indonesia.

Keywords: *terrorism, JCLEC, bilateral cooperation, transnational crime, Indonesia*

Pendahuluan

Terorisme internasional adalah penggunaan kekerasan yang luar biasa dan tidak dapat ditoleransi. Ancaman kekerasan dilakukan untuk tujuan tertentu, dalam tindakan pribadi yang sistematis atau kampanye kekerasan yang terutama ditujukan untuk mengintimidasi atau menciptakan ketakutan. Terorisme internasional tanpa pilih bulu atau membeda-

¹ Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa Karawang. Surel: dzikrazhaf01@gmail.com.

² Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa Karawang.

bedakan dalam mempraktikkan dan menjalankan ancaman kekerasan terhadap lawan atau kawan untuk mencapai tujuannya. (Kusumah, 2002). Terorisme internasional menyertakan pola simbolis atau pilihan perwakilan yang konstan dari target atau korbannya. Mereka dengan sengaja menimbulkan efek psikologis atau fisik pada kelompok masyarakat atau korban tertentu untuk mengubah perilaku politik sesuai dengan maksud dan ambisi mereka. Dan pada akhirnya mereka dapat bekerja sama dalam penyelidikan multi-yurisdiksi di masa depan.

Isu terorisme pertama kali timbul pada saat terjadinya Serangan 11 September 2001 yang merobohkan gedung World Trade Center (WTC) dan The Pentagon di New York, Amerika Serikat. Serangan ini menewaskan 2.996 jiwa dan melukai kurang lebih 6.000 jiwa. Empat pesawat dibajak oleh 19 militan yang berafiliasi dengan al-Qaeda, organisasi ekstremis Islam, yang kemudian menyerang sasaran Amerika dengan bom bunuh diri. (www.bbc.com). Menara World Trade Center di New York City ditabrak oleh dua pesawat. Pentagon di luar Washington DC ditabrak oleh pesawat ketiga segera setelah itu, dan pesawat terakhir jatuh di Shanksville, Pennsylvania. (www.kompas.com). Serangan ini dilakukan oleh sekelompok teroris beraliran Sunni, al-Qaeda, yang diketuai oleh Osama bin Laden. Ia menyatakan perang suci terhadap Amerika Serikat dan mengeluarkan fatwa pada tahun 1998 yang menyerukan pembantaian orang Amerika. (<https://internasional.kontan.co.id>). Belum sebulan setelah terjadinya serangan, Presiden George W. Bush, dengan dukungan koalisi internasional, memelopori invasi Afghanistan untuk memberantas al-Qaeda dan memburu Osama bin Laden. Baru pada tahun 2011 Osama bin Laden tertangkap dan dibunuh oleh pasukan AS di Pakistan. Sesaat setelah itu, AS melangsungkan perang global melawan terorisme atau biasa disebut dengan Global War on Terrorism (GWOT). Asia Tenggara terpengaruh oleh gerakan yang berasal dari Amerika Serikat ini. Bahkan Presiden Bush sendiri menggunakan Asia Tenggara sebagai metafora untuk *front* kedua dalam perang melawan terorisme. Mengenai maraknya terorisme, Asia Tenggara telah menarik perhatian seluruh dunia. Selain berbagai negara di Asia Tengah (Afghanistan), dan Timur Tengah, kawasan ini dianggap sebagai salah satu kawasan krusial. Selain sebagai rumah dan tempat pembelajaran salah satu jaringan teroris global, yaitu Jemaah Islamiyah (JI), Asia Tenggara juga menjadi tujuan ancaman dan sasaran terorisme yang selama ini didominasi oleh penyerbuan radikal terhadap instalasi penting asing juga penyerangan yang menargetkan agama lain. (Ansori, 2018). Di Indonesia aksi terorisme bukan merupakan sesuatu yang asing lagi. Terorisme di Indonesia kebanyakan dilancarkan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang beraliansi dengan Al-Qaeda yang merupakan dalang serangan 9 September 2001 atau kelompok militan yang menggunakan pandangan serupa. Sejak 2002, sudah ada beberapa target negara asing yang telah diserang. Para korbannya merupakan turis asing dan warga Indonesia.

Di Indonesia, terorisme pertama kali muncul pada tahun 2000 dengan pengeboman di kedutaan besar Filipina, diikuti oleh serangan lainnya, termasuk serangan terbesar dan paling buruk di Bom Bali tahun 2002, Bursa Efek Jakarta, dan Bom Malam Natal tahun 2000, semua pengeboman dipimpin oleh Dr. Azahari dan Noordin M. Top, mereka adalah teroris berkewarganegaraan Malaysia. Salah satu serangan terorisme yang paling buruk dan paling banyak memakan korban dalam sejarah Indonesia adalah Bom Bali. Pada tahun 2002 terdapat insiden pengeboman yang terjadi di Bali tepatnya pada malam hari sekitar pukul 23.15 tanggal 12 Oktober 2002. Sari Club dan Paddy's Pub di Jalan Legian Kuta keduanya mengalami ledakan malam itu, sedangkan ledakan ketiga terjadi di dekat kantor konsulat jenderal Amerika Serikat. Peristiwa ini terjadi dikarenakan kerusuhan di Ambon dan Poso. Kerusuhan tersebut menyebabkan banyak umat muslim yang tewas. Maka dari itu para teroris melancarkan serangan Bom Bali untuk

membalaskan dendam mereka. Selain itu, Bom Bali terjadi untuk melindungi veteran Perang Afghanistan dari penindasan Amerika karena teroris berpikir bahwa Perang Afghanistan yang harus disalahkan atas tindakan mereka. Motif dari peristiwa serangan Bom Bali juga karena para teroris meyakini bahwa Bali adalah senter dari kemaksiatan dan tempat yang tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dari ledakan tersebut tercatat ada 202 orang tewas, 209 luka-luka yang mayoritas korbannya adalah wisatawan asing asal Australia. Pada 9 September 2004, terjadi pula pengeboman di Kedutaan Besar Australia. Aksi ini merupakan aksi terorisme ketiga setelah Bom Bali pada 2002 dan Bom JW Marriott pada 2003.

Kegiatan terorisme sering terjadi di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan lemahnya pertahanan dan keamanan nasional di kawasan tersebut. Maka dari itu, Indonesia dan Australia melalui Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Republik Indonesia membentuk kerja sama khusus untuk menginvestigasi kasus Bom Bali yaitu Joint Investigation and Intelligence Team. Kedua negara mendukung kerja sama pemerintah dalam anti-teroris. Karena terorisme merupakan kejahatan transnasional, jaringan yang terorganisir dan memerlukan perhatian serius dari kedua negara. Sebagai negara yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia, Australia meyakini bahwa kerja sama dengan Indonesia di sektor keamanan dan pertahanan sangatlah diperlukan. Hal ini termasuk kepentingan nasional Australia dalam menjaga stabilitas kawasan. Apalagi terorisme yang merupakan kejahatan lintas negara akan sangat susah dilakukan jika hanya dilakukan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, membangun pertahanan dan keamanan kawasan memerlukan kerjasama kawasan. Rentetan serangan pengeboman di Indonesia mendorong pemerintah Australia dan Indonesia untuk bekerja sama dalam memperkuat pertahanan dan keamanan kedua belah pihak dalam memerangi terorisme guna menjaga stabilitas regional dan global. Sejak saat itu pula Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk bekerja sama dengan Australia demi menjaga pertahanan dan keamanan kedua negara. Kedua negara tersebut mendirikan *Jakarta Centre for Law Enforcement* (JCLEC). JCLEC merupakan inovasi kontra-terorisme utama. Upaya bersama antara pemerintah Australia dan Indonesia dikelola dan dikembangkan bersama oleh Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Nasional Indonesia, dan telah menarik minat dan dukungan lembaga penegak hukum di seluruh dunia.

Pembahasan

Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia

Hubungan yang hanya melibatkan dua negara disebut hubungan bilateral. Hal ini terutama berlaku untuk ikatan politik, ekonomi, dan budaya yang ada di antara kedua negara. (Liling,2020). Pentingnya interaksi bilateral adalah interaksi dua negara yang disempurnakan dan dikembangkan dengan tetap memperhatikan hak masing-masing pihak untuk melakukan berbagai bentuk kerjasama di bidang kenegaraan dan bangsa, tanpa mengabaikan atau melupakan keberadaan bersama kedua negara, karena terciptanya perdamaian dan kemakmuran menambah nilai yang menguntungkan bagi hubungan bilateral. (Harismawati, 2018) Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu pula hubungan internasional Indonesia dengan negara lain dimulai. Indonesia telah merumuskan rencana regional dan multilateral bersama dengan negara-negara sahabat.

Dalam membentuk hubungan tersebut, Indonesia selalu menjunjung tinggi untuk memelihara kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai tanpa mencampuri urusan internal negara lain, menolak untuk menggunakan kekuatan serta musyawarah dan memprioritaskan jalan tengah dalam proses pengambilan keputusan. Sejauh ini, Dengan 162 negara, Indonesia sejauh ini telah menjalin hubungan bilateral, termasuk dengan Australia. (<https://kemlu.go.id/>). Indonesia dan Australia telah menjalin

hubungan diplomatik sejak 1949 karena itu, agar Australia akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia dalam debat di PBB. Pada 1971 juga akhirnya kedutaan besar Indonesia untuk Australia berdiri di Yarralumla, Canberra. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia sering mengalami turun naik. Hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor geografis yang cukup dekat, yang biasanya mengarah pada masalah teritorial. Kedua negara memiliki faktor budaya yang berbeda dalam hal norma, nilai, agama, dan adat istiadat dan yang utama adalah dari faktor kepentingan nasional. Hubungan Indonesia dan Australia bisa dibilang merenggang ketika presiden Soekarno menerapkan politik luar negeri Indonesia yang bersifat militan pada saat dalam usaha pembebasan Irian Barat, yang mengakibatkan ketegangan atau pembekuan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Indonesia dengan tegas mempertahankan Irian Barat. Dalam keadaan ini, Australia menolak masuknya Irian Barat ke wilayah Indonesia dan berharap Irian Barat menjadi otoritas Belanda. Menlu Australia saat itu berpandangan bahwa Irian Barat merupakan garis pertahanan terakhir Australia terhadap serangan dari utara, bahwa masa depan Irian Barat sangat penting bagi kemajuan Australia dan bahwa Irian Barat tidak cocok untuk Indonesia karena pada saat itu, Indonesia memiliki kehadiran Partai Komunis Indonesia yang cukup besar sementara Australia anti-komunis. Persoalan ini akhirnya selesai setelah penandatanganan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1963 oleh Menteri Luar Negeri Belanda dan Indonesia yang menjelaskan bahwa Irian Barat adalah wilayah Indonesia.

Hubungan diplomatik Indonesia Australia sejak saat itu melunak ketika era orde baru dimulai. Pada masa ini banyak disepakati berbagai kerja sama seperti, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hubungan antara Indonesia dan Australia memanas selama reformasi karena Australia menuntut agar Indonesia segera membebaskan Timor Timur dan Australia akan mendukung penuh kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Selanjutnya, Australia menyediakan pasukan penjaga perdamaian untuk menjamin keberhasilan referendum, yang dianggap tidak sopan oleh Indonesia karena meragukan kredibilitas keamanan Indonesia. Setahun setelah terjadinya peristiwa 9 September 2001 di AS, pada tahun 2002 terdapat peristiwa pengeboman yang terjadi di Bali tepatnya pada malam hari sekitar pukul 23.15 tanggal 12 Oktober 2002. Malam itu terjadi tiga serangan pengeboman, dua bom meledak di Sari Club dan Paddy's Pub di Jalan Legian, Kuta dan bom terakhir meledak di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Dari ledakan itu tercatat ada 202 orang tewas, 209 luka-luka yang mayoritas korbannya adalah wisatawan asing asal Australia berjumlah 88 orang. (www.bbc.com).

Sebagai tanda keseriusan dalam memberantas terorisme, pemerintah Australia mengirimkan Kepolisian Federal Australia (AFP) untuk membantu dalam penyelidikan kasus bom Bali. AFP menawarkan bantuan teknologi yang berharga, terutama untuk penyelidikan forensik. Tim investigasi berhasil menemukan dan menahan tersangka utama, yang terkait erat dengan beberapa organisasi radikal Islam, dalam waktu kurang dari sebulan. (Fatmawati, Tarunasena, 2018). Kemudian, pada tahun 2002, dibentuk perjanjian formal pertama antara Indonesia dan Australia, yang disebut *MoU on Combating International Terrorism*, sebagai awal untuk memerangi terorisme internasional. (Nastiti, Djemat, Dwiprigitaningtias, 2017) Pada tahun 2006, kerja sama tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan dibuatnya suatu kerangka kerja pada tanggal 13 November 2006 yang disebut sebagai *The Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation* atau *Lombok Treaty*. Ketentuan *Lombok Treaty* terdiri dari 21 elemen kunci yang dirinci menjadi sepuluh bidang kerja, antara lain kerja sama di bidang pertahanan, penegakan hukum,

kontraterorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, proliferasi, senjata pemusnah massal, bantuan darurat, kerjasama dalam organisasi internasional dalam masalah keamanan, dan saling pengertian. (Hakim, 2010). Manfaat Traktat Lombok telah memberikan polisi Indonesia sumber daya Australia yang signifikan untuk memerangi terorisme. Bersama Australia, JCLEC memfasilitasi upaya kontraterorisme melalui operasi bersama, berbagi informasi dan intelijen, pembentukan kantor penghubung dan penempatan petugas penghubung, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia, dan peralatan. (www.pinterpolitik.com). Beberapa contoh kerja sama Indonesia Australia di berbagai bidang:

1. Pendidikan

Untuk meningkatkan performa siswa, Indonesia dan Australia bekerja sama dengan memberikan arahan dan keahlian, menguji pendekatan baru dan memberikan kontribusi penelitian dan gagasan untuk meningkatkan kebijakan pendidikan. Australia menyediakan universitas-universitas Australia dengan beasiswa pascasarjana jangka pendek dan jangka panjang. Lewat Australia Awards di Indonesia (AAI) dan meyakinkan bahwa mereka pasti terhubung melalui Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama untuk mengetahui apa yang paling berhasil secara lokal dalam meningkatkan hasil membaca dan berhitung. INOVASI mengadaptasi solusi internasional dengan konteks lokal, desain, mengimplementasikan dan mengevaluasi penyelesaian melalui berbagai proyek percontohan. (<https://indonesia.embassy.gov.au>).

2. Kesehatan

Australia dan Indonesia bekerja sama untuk memerangi penyakit menular yang baru berkembang dan mengurangi malnutrisi pada anak dan ibu. Australia dan Indonesia mendukung inisiatif untuk memerangi HIV/AIDS dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan melalui inisiatif pembangunan sosial dan anti-kemiskinan. (<https://indonesia.embassy.gov.au>).

3. Ekonomi

Pemerintah dan DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) menjadi undang-undang. Kerja sama IA-CEPA kemudian akan dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini. IA-CEPA merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan di tengah kondisi ekonomi global yang memburuk dan meningkatnya hambatan perdagangan di semua negara untuk memperkuat kapasitas ekspor produk dan jasa, revitalisasi investasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui perdagangan, bisnis, dan pariwisata, kesepakatan ini dapat meningkatkan kerjasama Australia dan Indonesia. (<https://indonesia.go.id>)

4. Pariwisata

Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi tujuan utama para wisatawan asing, tak terkecuali dengan wisatawan asal Australia. Khususnya Bali yang merupakan provinsi paling terkenal.

5. Perubahan Iklim

Indonesia Australia telah bekerjasama dalam finalisasi *carbon accounting*, yaitu, yang akhirnya ditetapkan dalam Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS). Australia juga membantu Indonesia mengembangkan alat pengukuran, pelaporan dan verifikasi. Hal ini penting saat menghitung emisi karbon. (<https://ekonomi.bisnis.com>)

6. Sosial Kemanusiaan

Kerja Sama Bilateral Indonesia Australia dalam Mencegah Terjadinya Terorisme melalui JCLEC

Australia memberikan bantuan sosial kemanusiaan dan pembangunan berupa Official Development Aid ketika Indonesia mengalami bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi

Upaya Pencegahan Terorisme melalui JCLEC

Jakarta Center for Law Enforcement (JCLEC) adalah inovasi kontra-terorisme utama. Upaya bersama antara pemerintah Australia dan Indonesia dikelola dan dikembangkan bersama oleh Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Nasional Indonesia, dan telah menarik minat dan dukungan lembaga penegak hukum di seluruh dunia. (www.70yearsindonesiaaustralia.com). Kedudukan dan tujuan JCLEC dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum tentang ancaman terorisme dan kejahatan transnasional lainnya, meningkatkan efisiensi unit kerja dalam memerangi ancaman kejahatan transnasional, dan meningkatkan pengakuan masyarakat internasional atas komitmen pemerintah Indonesia untuk memerangi kejahatan transnasional. ancaman kejahatan transnasional dan kerjasama antara AFP dan polisi.

Berbagai bentuk terorisme dan kejahatan transnasional menimbulkan ancaman tidak hanya bagi keamanan dan stabilitas suatu negara tetapi juga bagi seluruh kawasan. Kelompok kriminal yang melakukan kejahatan lintas batas negara dan yurisdiksi masih mempunyai kualitas keluwesan dan daya untuk penyesuaian yang tinggi dalam upaya menciptakan teror atau keuntungan dari kegiatan ilegal. Dalam konteks operasional inilah JCLEC dapat memberikan para penyidik dan pemimpin senior yang berpengalaman di bidang penegakan hukum kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan internasional sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan jaringan pribadi dan profesional dengan sesama aparat penegak hukum. Keberadaannya merupakan wujud atau bentuk respon positif dan tanggung jawab atas komitmen antara Indonesia dan Australia serta negara-negara di zona Asia-Pasifik terhadap hubungan internasional. Atas dasar hubungan dan kerja sama bilateral, kedua pemerintah memprakarsai dan menjadi sponsor pembangunan dan donor utama pengoperasian proyek JCLEC. (Nursalim, 2021). JCLEC menitikberatkan pada pengembangan kapasitas dan kemampuan aparat hukum di area ASEAN untuk merespon ancaman teroris di bidang kejahatan transnasional. JCLEC disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri pada 3 Juli 2004 dan JCLEC beroperasi penuh pada Agustus 2005. Pada tahun 2004, pemerintah Australia menjanjikan \$36,8 juta AUD untuk membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pengembangan dan pengoperasian JCLEC. Posisi JCLEC penting karena menangani berbagai isu transnasional, seperti pencucian uang, penyelundupan senjata, transfer informasi sensitif, dan lain-lain. JCLEC menawarkan fasilitas pelatihan sehingga aparat penegak hukum dapat mengenali dan meramalkan ancaman teroris. Tujuan utama JCLEC adalah untuk menambah kapasitas perundang-undangan untuk menyelidiki kasus terorisme dan kejahatan transnasional di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Penguatan perundang-undangan dan hukum selaku sarana pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional,
2. Memajukan pengembangan penyidikan kasus terorisme, dan
3. Menambah kekuatan para intelijen. (Rozka,2017).

Sejak didirikan pada tahun 2004, JCLEC telah mengembangkan lebih dari 1.200 program dengan 24.000 peserta dan 5.500 mentor dari lebih dari 73 negara dan dengan dukungan lebih dari 20 negara. (<https://nasional.sindonews.com>). Untuk mempercepat upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, pemerintah Indonesia dan Australia,

melalui dukungan JCLEC, dalam upaya mempercepat penanggulangan terorisme di Indonesia, dilakukan dengan cara menyelenggarakan penyuluhan peningkatan kemampuan di institusi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia, dan peralatan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan dan pertukaran staf, program pelatihan bersama, pengembangan infrastruktur organisasi, arahan dan peninjauan, sokongan teknologi dan peralatan terkini, beserta seminar atau konferensi yang dapat mendukung upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Selain itu, JCLEC juga memiliki beberapa fungsi JCLEC yaitu sebagai berikut:

1. Atas dasar supremasi hukum, program peningkatan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan dilakukan melalui berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di antara berbagai organisasi nasional, internasional, dan multilateral.
2. Standar internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, diikuti secara profesional dan dalam pemberian pendidikan dan pelatihan.
3. Jika perlu, pelatihan dan peningkatan yang dilakukan memiliki bobot yang sesuai dengan nilai kredit pelatihan sarjana dan pascasarjana
4. Berfungsi sebagai tempat untuk berbagi pengetahuan dan perspektif baru dalam memerangi terorisme dan kejahatan internasional lainnya. (<https://adoc.pub>)

Pada 21 Desember 2015, Pertemuan pertama Dewan Menteri Hukum dan Keamanan Indonesia-Australia berlangsung di Jakarta, Indonesia. Peserta antara lain Menko Polhukam, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Jaksa Agung Australia, Menteri Kehakiman, dan Asisten Menteri Penanggulangan Terorisme Australia. Berkaitan dengan perang melawan terorisme, para menteri menunjuk kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan komitmen yang dibuat pada pertemuan tersebut, termasuk melalui langkah-langkah untuk membangun kapasitas untuk memerangi ekstremisme kekerasan, mengembangkan strategi untuk memerangi propaganda ekstremis, terutama melalui media sosial, serta sebagai meningkatkan berbagi informasi untuk memberantas aliran keuangan gelap dengan organisasi teroris. Hal ini juga didukung dengan diadakannya pertemuan teknis bilateral di antara para pejabat senior untuk meningkatkan pemahaman tentang aliran keuangan ilegal yang digunakan untuk melawan pendanaan teroris. Dalam kasus pejuang teroris asing, Menteri menyoroti dibutuhkan kolaborasi yang lebih besar untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional dan regional yang ditimbulkan oleh pejuang teroris. Para menteri mengantisipasi bahwa ini akan mengarah pada lebih banyak kerja sama antara kedua belah pihak, khususnya melalui Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), di bidang pendidikan dan pelatihan, berbagi informasi dan analisis, serta keterampilan teknologi. (<https://indonesia.embassy.gov.au>)

Sejak didirikan pada tahun 2004, JCLEC telah melaksanakan lebih dari 1.200 program dengan 24.000 kontestan dari 73 negara anggota JCLEC Beberapa contoh acara dan peserta yang diselenggarakan oleh JCLEC antara lain empat acara pada tahun 2004 dengan 89 peserta, 27 acara pada tahun 2005 dengan 741 peserta, 49 acara pada tahun 2006 dengan 1.018 peserta, 63 acara pada tahun 2007 dengan 1.304 peserta, 55 acara pada tahun 2008 dengan 1.294 peserta, 81 program diikuti 2.049 kontestan pada 2010, 92 program pada 2011 memiliki 2.311 kontestan, 81 program di 2012 memiliki 2.118 kontestan, Pada 2013 terdapat 2.254 kontestan terdiri dalam program pelatihan penelitian dan pengembangan sebesar 36% dari jumlah pelatihan sebanyak 220 kali , dan 37% dari keseluruhan pelatihan dalam pengembangan manajemen. 226 kali secara keseluruhan, 92 kali untuk pelatihan forensik dan 73 kali untuk pertumbuhan kecerdasan sebagai hasil dari pelatihan. (Nursalim, 2021). Dan pada tahun 2017, 55 negara bekerja sama dengan JCLEC terkait program pelatihan, terdapat 122 program pelatihan yang

dilakukan oleh JCLEC bekerja sama dengan pemerintah dalam dan luar negeri serta beberapa lembaga donor luar negeri. Program Manajemen Insiden Pasca Ledakan, Program Pengenalan dan Identifikasi Senjata Api, Program Anti Terorisme dan Penuntutan Hukum, Program Kepemimpinan Intelijen Kriminal, Program Kepemimpinan Eksekutif Regional, Program Manajemen Internasional Kejahatan Berat, Program Anti Pencucian Uang, dan puluhan lainnya program unggulan hanyalah beberapa dari materi pelatihan yang ditawarkan di JCLEC. Perkembangan JCLEC juga bertambah melonjak dari tahun ke tahun. Yaitu bertambah banyaknya keikutsertaan peserta baru dari negara lain dan juga keikutsertaan kontestan polisi wanita yang makin meroket peminatnya. (<https://tribrataneews.jateng.polri.go.id/>)

Kesimpulan

Tujuh belas tahun keberadaan JCLEC telah membuahkan hasil yang cukup baik. Sejak dibentuk pada tahun 2004, keberadaan JCLEC sangat penting dalam memerangi kejahatan transnasional. Selain itu, JCLEC juga berkembang pesat dalam hal fasilitas dan pelatihan. Upaya Indonesia Australia dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional lainnya juga dinilai cukup baik. Meskipun masih terdapat sejumlah hambatan dalam perwujudan kerja sama bilateral, regional dan multilateral, namun keseriusan dan kerja keras pemerintah untuk mengatasi ancaman dan bahaya terorisme telah melahirkan hasil yang positif. Hal ini didukung oleh tingginya apresiasi rakyat internasional terhadap Indonesia yang dibuktikan oleh aparat keamanan Indonesia yang berhasil menangkap tokoh kunci di balik beberapa serangan bom di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. dan menyingkap jaringan teroris yang berkembang di Indonesia. Yang paling penting dalam pemberantasan terorisme adalah meningkatkan kerja sama luar negeri memerangi terorisme internasional. karena terorisme sudah menjadi kejahatan transnasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia telah menerima delapan perjanjian anti-terorisme internasional yang membuat sistem hukum negara lebih kuat, dan mengenai isu *Foreign Terrorist Fighters* (FTF), Indonesia juga telah menyelenggarakan serangkaian seminar regional dan konferensi internasional yang diikuti oleh banyak negara. Hal ini dilakukan untuk berbagi informasi dan praktik terbaik, serta cara untuk memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi masalah terorisme. Namun, kerja sama ini seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan teknis dan fungsional, tetapi juga pada penumpasan teroris dengan lebih memperhatikan sumber penyebab masalah munculnya terorisme itu sendiri. Selain itu, salah satu program yang dilaksanakan untuk menumpaskan kejahatan transnasional terorisme adalah dengan meningkatkan program deradikalisasi kepada pidana tindak terorisme atau kejahatan transnasional lainnya agar tidak lagi melakukan tindak kejahatan lagi. Dengan koordinasi yang baik antar kepolisian di kawasan Asia-Pasifik, diharapkan kapasitas kepolisian dalam menangani masalah kejahatan lintas batas dapat meningkat.

Referensi

- 70 Years Indonesia Australia. (2019). *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation*. Diakses 19 Oktober 2021, dari 70yearsindonesiaaustralia website: <https://www.70yearsindonesiaaustralia.com/kerja-sama-antara-australia-dan-indonesia/jakarta-centre-for-law-enforcement-cooperation-th9kb>
- Fatmawati, & Tarunasena (2018). *Dinamika Hubungan Bilateral Australia_Indonesia Pada Masa Perdana Menteri John Howard Tahun 1996-2007*. Diakses 20 Oktober 2021, dari Ejournal.upi website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/download/15602/8737>

- Hendra, R. (2017). Rapat Koordinasi Kerja sama Luar Negeri Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI dengan Donor Luar Negeri. Diakses 25 Oktober 2021, dari Ecpatindonesia.org website: <https://ecpatindonesia.org/en/news/rapat-koordinasi-kerja-sama-luar-negeri-lembaga-pendidikan-dan-pelatihan-polri-dengan-donor-luar-negeri/>
- Harismawati, S. (2018). Kerja sama Indonesia-Jerman di Sektor Budaya dalam Jakarta Declaration Indonesia-Germany Joint Declaration For A Comprehensive Partnership Periode 2012-2016. Diakses 20 Oktober 2021, dari Repository.upnvj website: <https://repository.upnvj.ac.id/1853/3/BAB%20I.pdf>
- Indraguna, D. J. (2018). Kerja sama Bilateral NCB Interpol Indonesia dengan NCB Interpol Australia dalam Hal Pengembalian Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Diakses 21 Oktober 2021, dari Repository.unpas website: <http://repository.unpas.ac.id/35864/1/BAB%20II.pdf>
- Jackson, P. (2021). Serangan 11 September: Apa yang Terjadi Hari Itu dan Setelahnya?. Diakses 19 Oktober 2021, dari Bbc.com website: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58084150>
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. (2018). Kemitraan Pembangunan dengan Indonesia. Diakses 21 Oktober 2021, dari Indonesia.embassy.gov.au website: <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html>
- Kartawijaya, H. Perubahan Atas Protokol Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) Untuk Mendirikan Pusat Kerja sama Penegakan Hukum Jakarta (JCLEC). Diakses 23 Oktober 2021, dari Adoc.pub website: <https://adoc.pub/kepolisian-negara-republik-indonesia-polri-dan-kepolisian-fe.html>
- Kedutaan Besar Australia Indonesia (2015). Pernyataan Bersama Pertemuan Dewan Menteri Indonesia-Australia dalam bidang Hukum dan Keamanan. Diakses 25 Oktober 2021, dari Indonesia.embassy.gov.au website: https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB15_001.html
- Kementerian Luar Negeri RI (2019). Kerja sama Bilateral. Diakses 20 Oktober 2021, dari Kemlu.go.id website: <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJIZCUyMERvY3VtZW50cy9JRE4tVU5JVEVEJTIwTkVXU19FREITSSUyMFnFUFRTUjFUiUyMDIwMTgucGRm>
- Kurnia, K. (2013). Kerja sama Indonesia-Australia dalam Upaya Perlawanan Terorisme di Indonesia : Pembentukan Jakarta Centre for Law Enforcement (JCLEC). Diakses 22 Oktober 2021, dari Repository.unpad website: http://media.unpad.ac.id/thesis/170210/2007/170210070108_1_7979.pdf
- Lawi, G. F. K., (2018). Perubahan Iklim: Indonesia-Australia Kerja Sama Dalam Penghitungan Emisi Karbon. Diakses 26 Oktober 2021, dari Ekonomi.bisnis.com website: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181211/99/868418/perubahan-iklim-indonesia-australia-kerja-sama-dalam-penghitungan-emisi-karbon>
- Liling, K. (2020). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia dalam Penandatanganan Kerja sama Indonesia-Australia Comprehensive Economy Partnership Agreement (IA-CEPA). Diakses 20 Oktober 2021, dari Repository.unibos website: <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/161/KRISDAYANTI%20LILING%204517023007.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Nastiti, N. N., Djemat, O. Y., & Dwiprigitaningtias, I. (2017). Tantangan Implementasi Kerja sama Anti-Terrorisme Antara Indonesia dan Australia Tahun 2007-2016. Diakses 19 Oktober 2021, dari Fisip.unjani website: <http://fisip.unjani.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Tantangan-Implementasi-Kerja-sama-Anti-Terrorisme-Antara-Indonesia-dan-Australia-Tahun-2007-2016-Nala-Nourma-Nastiti-Yuswari-O-Djemat-Indah-Dwiprigitaningtias.pdf>
- Nurdin, E. (2020). Anak Korban Bom Bali 1 ke Pelaku: 'Saat Umur 10 Tahun Saya Lihat Jenazah Ayah Hangus, Bayangkan Kalau Bapak Jadi Saya. Diakses 20 Oktober 2021, dari Bbc.com website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50408538>

- Nursalim, A. M. (2021). Pengembangan Organisasi Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) dalam Membangun Kerja sama Multilateral. Diakses 23 Oktober 2021, dari Jurnal.untagsmg website: <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/2272>
- P, Ansori (2018). Peran ASEAN Convention On Counter Terrorism dalam Menanggulangi Terorisme di Asia Tenggara. Diakses 26 November 2021, dari Eprints.undip website: http://eprints.undip.ac.id/75584/3/BAB_II.pdf
- Polda, Humas (2019). Delegasi Indomalphi Kunjungi Fasilitas Pelatihan Polri Bertaraf Internasional JCLEC. Diakses 25 Oktober 2021, dari Tribatanews.jateng website: <https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2019/08/07/delegasi-indomalphi-kunjungi-fasilitas-pelatihan-polri-bertaraf-internasional-jclec/>
- Romano, P. C. (2021). Bom Bali dan Hubungan Indonesia-Australia. Diakses 21 Oktober 2021, dari Pinterpolitik.com website: <https://www.pinterpolitik.com/ruang-publik/bom-bali-dan-hubungan-indonesia-australia>
- Rozka, A. (2017). Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Australia dalam Bidang Ekonomi dan Pertahanan pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Diakses 22 Oktober 2021, dari Repository.umy website: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11051/BAB%20III.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- Salamuddin, B., Prof. Dr. Jahja Muhaimin. (2020). Peran JCLEC dalam Meningkatkan Kapasitas dan Efektifitas Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan Transnasional Lainnya di Indonesia. Diakses 21 Oktober 2021, dari Repository.ugm website: http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/46815
- Sasongko, D. (2020). Kerja Sama Internasional Kunci Atasi Terorisme. Diakses 22 Oktober 2021, dari Nasional.sindonews website: <https://nasional.sindonews.com/berita/1498432/14/kerja-sama-internasional-kunci-atasi-terorisme>
- Shalihah, N. F., (2021). Mengenang 20 Tahun Tragedi 9/11, Apa yang Terjadi Saat Itu?. Diakses 27 Oktober 2021, dari Kompas.com website: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/11/080500465/mengenang-20-tahun-tragedi-9-11-apa-yang-terjadi-saat-itu-?page=all>
- Sutrisno, E. (2020). Babak Baru Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Australia. Diakses 21 Oktober 2021, dari Indonesia.go.id website: <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/1656/babak-baru-kerja-sama-ekonomi-indonesia-australia>
- W. Kusumah, M. (2002). Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum. Diakses 19 Oktober 2021, dari Media.neliti website: <https://media.neliti.com/media/publications/4223-ID-terorisme-dalam-perspektif-politik-dan-hukum.pdf>
- Widodo, P. W., (2020). Peringatan peristiwa 911: Ini Dia Latar Belakang Serangan Al-Qaeda ke Gedung WTC. Diakses 27 Oktober 2021, dari Internasional.kontan.co website: <https://internasional.kontan.co.id/news/peringatan-peristiwa-911-ini-dia-latar-belakang-serangan-al-qaeda-ke-gedung-wtc>
- Yuda Hardiana, I. M., Sushanti S., & Fasisaka, I. (2014). Kerja sama Kontra-Terrorisme Antara Australia dengan Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme di Indonesia (2002-2008). Diakses 19 Oktober 2021, dari Ojs.unud website: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/11101/7906>
- Hakim, Fathoni. M., (2010). Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia; Upaya Indonesia untuk Mencegah Gerakan Separatisme di Indonesia Timur. Diakses 19 Oktober 2021, dari Lib.ui website: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135537-T%2027969-Perjanjian%20keamanan-Methodologi.pdf>